

kemungkinan untuk memilih jalan yang lebih opresif. Dalam scenario ini, sistem politik mungkin akan lebih sedikit terbuka, seperti pada awal Orde Baru. Kemungkinan sekali Golkar akan didorong lebih mandiri, dan PDI mungkin akan terus dibantu dengan subsidi. Karena baik PDI maupun PPP tak mungkin memperoleh suara mayoritas, maka Golkar dibayangkannya akan tetap memegang hegemoni dan menempuh jalan seperti Partai Revolusioner Institutional Mexico. Pengaruh militer akan makin berkurang dalam partai ini, demikian juga pemerintahan tetapi kepentingan korporatisnya tetap berjalan. (Ulf Sundhaussen, 1988).

Sepintas lalu, scenario Sundhaussen ini mengingatkan kembali kepada model demokrasi Asia Timur seperti pernah ditulis Huntington, dengan satu partai hegemonek dan partai-partai oposisi yang sekedar meramaikan demokrasi. Pola seperti LDP di Jepang, KMT di Taiwan dan gabungan antara partai pemerintah dengan sebagian kelompok oposisi di Korea, juga UMNO di Malaysia dan PAP di Singapura, merupakan contoh soalnya. (Samuel P. Huntington, 1991).

Manakah diantara scenario itu yang mungkin dimainkan, sedikit

banyaknya akan tergantung kepada dinamika interaksi antara ABRI dan kelompok-kelompok yang beredar dalam orbit politik. Dapat saja terjadi, menguatnya partai hegemonek yang sendiri justru dirasakan sebagai mengganggu kepentingan ABRI, dan karena itu partai-partai saingan perlu lebih didorong. Ringkasnya, jika perubahan ke arah demokratisasi memang dikehendaki, tampaknya akan diperlukan pola imbalan yang baru antara ABRI dan kelompok-kelompok politik lain. Di dalamnya akan tercakup pengaturan dwi fungsi yang lebih luwes dan dapat diterima secara lebih baik. Tentu tidak realistis untuk membayangkan hapusnya dwi fungsi sama sekali, tetapi penyesuaian-penyusunan baru, sejalan dengan irama perkembangan masyarakat, rasanya mungkin dilakukan.

Keluwesannya juga diperlukan dalam menampung harapan akan perubahan tatanan politik termasuk soal kepartaian. Pernah kita dengar tentang perlunya partai keempat, tetapi juga pernah kita dengar tentang perlunya sistem dua partai.

Demokrasi Pancasila adalah upaya konkretisasi dari sila-sila dalam Pancasila (terutama sila ke 4 yang tidak boleh dilepaskan hubungannya dengan sila-sila lain).